

**PETA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA:
STUDI TERPILIHNYA K.H. MA'RUF AMIN
SEBAGAI BAKAL CAWAPRES BAKAL CAPRES INKUMBEN
JOKO WIDODO PADA PILPRES 2019**

Sonny

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
email: sonny.majid@gmail.com

Paper Accepted: 18 Maret 2019
Paper Reviewed: 21-28 Maret 2019
Paper Edited: 01-15 April 2019
Paper Approved: 25 April 2019

ABSTRAK

Pilkada DKI Jakarta turut mempengaruhi kontestasi Pilpres 2019. Politik identitas diduga menjadi salah satu indikator Bakal Cawapres Inkumben Jokowi memilih KH Ma'ruf Amin sebagai bakal cawapres. Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi mengakui bahwa salah satu persoalan bangsa Indonesia saat ini adalah "politik identitas." Kekhawatiran Jokowi terhadap serangan isu-isu yang dituduhkan kepadanya, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu, di mana ia dituduh sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali terulang pada pilpres 2019 dengan tuduhan: antek asing dan aseng, PKI, dan benci Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 2005: 4). Penelitian ini mengedepankan teori lensa atau teori perspektif. Dimana teori ini membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data (Sugiyono, 2012: 295). Metode ini digunakan, karena data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Jika mengacu pada judul penelitian yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau masyarakat mengenai gejala-gejala tertentu (Arikunto, 2002: 14). Politik identitas khususnya yang berbasis sentimen agama mulai memanas saat Pilkada DKI Jakarta. Sentimen agama menyeruak saat itu. Indikator terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden bakal calon presiden inkumben Joko Widodo akibat menguatnya politik identitas (bernuansa agama) atas situasi politik di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Identitas, Joko Widodo, KH Ma'ruf Amin, Pilpres 2019.

PENDAHULUAN

Penggunaan permainan politik identitas di kancah perpolitikan di Indonesia kini menjadi sorotan banyak pihak. Ini sekaligus sebenarnya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Nuri Soeseno dalam sebuah kesempatan seminar nasional “Refleksi 20 Tahun Reformasi” yang digelar Departemen Ilmu Politik Fisip UI pada Senin (14/5/2018) yang dimuat situs www.ui.ac.id menjelaskan, bahwa konteks eksistensi negara-negara akan mendapat tantangan serius dari dua gerakan yang bertentangan; menyempal dan menyatukan. Menurutnya, dua kutub gerakan tersebut datang dari sub negara layaknya iakatan bangsa atau etnis yang muncul dan berupaya memisahkan diri. Hal ini bersamaan dengan adanya kekuatan institusi supra negara seperti WTO, IMF ataupun ASEAN yang bekerja untuk menyatukan dan menyeragamkan kegiatan perekonomian dan pemerintahan di tingkat global maupun regional.

Nuri Soeseno pada kesempatan itu mengutip pendapat sosiolog Spanyol Manuel Castell dalam buku “The Power of Identity” dimana dijelaskan di dalam buku tersebut, bahwa dalam era globalisasi sekarang, ketika dunia semakin global, maka orang cenderung mengidentifikasi diri mereka kali pertama adalah dengan lokalitas mereka. Bagaimana di Indonesia sendiri, dimana Indonesia multi nasional dan multi etnis? Menurutnya, identitas nasional seseorang dapat berlapis dan hadir dari lebih dari satu level. “Ini artinya warganegara sebuah negara bisa mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok nasional, anggota sub-nasional dan sekaligus anggota sebuah kelompok minoritas,” terang Nuri sebagaimana ditulis www.ui.ac.id.

Masih menurut pendapat Nuri Soeseno, bahwa masalah serius dapat muncul jika nasionalisme etnis dalam sebuah komunitas politik yakni negara-lebih besar daripada nasionalisme sipil, maka potensi konflik yang serius bisa terjadi. Hal ini lantaran di antara dua tipe tersebut timbul karena pengabaian eksistensi minoritas nasional atau minoritas etnokultural. “Apabila negara gagal memenuhi tugasnya mengembangkan kewarganegaraan sipil dan sosial sehingga ada sebagian dari warganegara atau kelompok tertentu dalam masyarakat politik lebih menderita dari warga negara atau kelompok lain, nasionalisme etnis yang negatif dapat berkembang

dengan mudah,” demikian Nuri menambahkan pendapatnya.

Ia kembali mengutip gagasan David Miller, seorang ilmuwan politik Britania Raya yang menegaskan, sejatinya dua tuntutan khas perpolitikan identitas dalam setiap perjuangan, mendapatkan pengakuan keberbedaan identitas antara lain dengan diberikannya kesempatan membangun institusi sosial dan kebudayaan sendiri, sehingga tidak tergerus ke dalam institusi budaya dan sosial dari kelompok yang dominan serta tuntutan yang diinklusikan.

Atas dasar itulah, maka Nuri kembali berpendapat dalam paparannya, keutuhan dan keberlangsungan negara akan terancam jika disatu sisi nasionalisme etnis bersikap tertutup, eksklusif, tidak toleran dan tidak kompromistis. Dan sisi lain nasionalisme sipil bersikap menekan nasionalisme etnis dan menuntut warga nasionalisme etnis untuk meninggalkan identitas etnisnya, kemudian memarjinalkan komunitas atau kebudayaan etnis.

Penggunaan politik identitas juga memengaruhi perpolitikan suatu negara. Ambil contoh kasus Pemilu di Amerika Serikat November 2016 yang memenangkan Donald Trump sebagai presiden. Singkat cerita warna politik identitas yang terjadi di Indonesia disebut-sebut bermula dari sini. Dimana *identity politics* atau politik identitas masuk sebagai perbendaharaan bahasa politik Indonesia setelah kemenangan Donald Trump secara tidak terduga. Dimana ketika itu para kolonialis poros tengah Amerika Serikat menyalahkan politik identitas. Kemudian oleh para pengamat di Indonesia, kekalahan Hillary Clinton dari Donald Trump karena politik identitas (Rustan, 2018).

Politik identitas di Indonesia sebenarnya bukan barang baru. Semenjak pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, politik identitas sudah mulai mewarnai pilkada di sejumlah daerah di Indonesia, seperti penggunaan jargon-jargon politik; putra daerah, pribumisasi dan penggunaan sentimen bernuansa agama. Menguatnya sentimen politik identitas di Indonesia adalah pada saat Pilkada DKI Jakarta yang digelar 15 Februari 2017, yang kemudian berlangsung putaran kedua pada 19 April 2017. Dimana pada putaran kedua pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat bertarung dengan pasangan Anies Baswedan-

Sandiaga Uno (id.wikipedia.org). Sementara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni kandas di putaran pertama.

Dalam Pilkada DKI Jakarta tersebut, penggunaan isu sentimen agama pasca-pernyataan kontroversi Ahok terkait Surat Al-Maidah: 53 dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu yang dianggap sebagai penistaan Al-Quran (penistaan agama). Meski awalnya pasangan Basuki-Djarot memimpin dalam sejumlah hasil survei, namun pernyataan Ahok tersebut memicu gelombang demonstrasi besar-besaran sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbasis agama (Islam) yang mendesak agar dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok diproses secara hukum yang terjadi pada 4 November 2017 yang dikenal dengan 411 dan 2 Desember 2017 disebut dengan 212.

Ahok dinyatakan bersalah karena dianggap melanggar pasal 156 dan 156a KUHP. Dimana pasal 156 berbunyi: "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500." Kemudian bunyi pasal 156a: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

Menurut pengamatan peneliti, Pilkada DKI Jakarta inilah yang pada akhirnya ikut memiliki peran memengaruhi kontestasi pada Pilpres 2019 mendatang, yang kemudian "politik identitas" diduga menjadi salah satu indikator Bakal Cawapres Inkumben Jokowi memilih KH Ma'ruf Amin sebagai bakal cawapres. Dimana dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi mengakui bahwa salah satu persoalan bangsa Indonesia saat ini adalah "politik identitas." Kekhawatiran Jokowi terhadap serangan isu-isu yang dituduhkan kepadanya, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu, dimana dia dituduh sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali terulang pada pilpres 2019 dengan tuduhan: antek asing dan aseng, PKI, dan benci Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 2005: 4).

Penelitian ini mengedepankan teori lensa atau teori perspektif. Dimana teori ini membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data (Sugiyono, 2012: 295). Metode ini digunakan, karena data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Jika mengacu pada judul penelitian yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau masyarakat mengenai gejala-gejala tertentu (Arikunto, 2002: 14).

Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2012: 309). Selanjutnya metode wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012: 316). Kemudian studi literatur/dokumen. Dokumen adalah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa/berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 326).

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Ridwan, 2004:138). Pengumpulan data terdiri dari: a). Data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 308) yang diperoleh dari hasil pengamatan selama proses terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai bakal cawapres Presiden Jokowi dan wawancara dari pemerhati politik dan tokoh-tokoh organisasi keagamaan, mengenai apakah politik identitas menjadi varian salah satu keputusan bakal capres Jokowi memilih KH Ma'ruf Amin sebagai bakal cawapresnya, b) Data sekunder, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012: 308) melalui pelacakan data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, sekaligus memperkaya substansi penelitian.

Untuk teknik analisis data, yang dipakai adalah analisis data kualitatif deskriptif. Analisis

deskriptif untuk menjawab pertanyaan apakah terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai bakal cawapres bakal capres Jokowi akibat eksese dari menguatnya warna politik identitas dalam perpolitikan di Indonesia. Semua data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Analisis data ini disebut juga pengolahan dan penafsiran data (Muhajir, 1996:104). Dengan pendekatan deskriptif ini maka peneliti akan dipandu untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2012: 290).

Tahapan penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi, wawancara dan studi literatur dilakukan peneliti selama sembilan (9) bulan sejak Februari hingga Oktober 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018

Politik identitas khususnya yang berbasis sentimen agama mulai memanas saat Pilkada DKI Jakarta. Sentimen agama menyeruak saat itu. Terlebih ketika calon gubernur DKI Jakarta inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Ahok Djarot Saiful Hidayat bertarung dengan pasangan Anies Baswedan-Sandidaga Uno di putaran kedua 19 April 2017. Sebelumnya pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni kandas di putaran pertama yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Tema politik bernuansa agama di Pilkada DKI Jakarta tersebut terjadi setelah Ahok sebagai calon gubernur inkumben menyatakan pernyataan kontroversi yang mengutip Surat Al-Maidah: 53 dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Dimana statemen Ahok tersebut dianggap sebagai bentuk penodaan/penistaan agama. Sebelum pernyataan itu muncul, sebenarnya pasangan Ahok-Djarot merajai hasil survei lembaga survei. Belakangan tergerus persentasi elektabilitasnya saat sejumlah organisasi kemasyarakatan berbasis agama melakukan demonstrasi besar-besaran dan beruntun yang dilakukan pada 4 November 2017 yang disebut dengan gerakan 411 dan aksi di depan Istana Negara serta Lapangan Monas pada 2 Desember 2017 atau yang dikenal dengan "Aksi 212."

Menurut pandangan pemerhati politik Doddy Dwi Nugroho yang lama mengamati perkembangan politik pasca-demonstrasi 411 dan

212, bahwa gerakan tersebut secara tidak langsung mengubah peta politik di Indonesia yang menurutnya signifikan.

"Trend isu yang dibangun berdasarkan sentimen agama seakan menjadi arus baru yang menemukan sebuah isu bersama dalam spektrum ideologi Islam yang mempunyai kekuatan cukup massif di akar rumput. Puncak politiknya adalah Ahok tumbang di Pilkada DKI Jakarta dan masuk penjara. Ini menjadi poin penting dalam perjalanan sejarah politik modern di Indonesia." (Wawancara, 12 September 2018).

Masih menurut Doddy, seharusnya semua pihak sudah harus membangun kesadaran dan perilaku politik yang baik di tengah-tengah masyarakat. Partai politik sudah sepatutnya berperan sebagai salah satu instrumen pendidikan politik kepada masyarakat. Jika politik identitas ini dibiarkan berlarut-larut, maka yang terjadi adalah kemunduran sistem demokrasi di Indonesia dan ancaman yang paling membahayakan adalah perpecahan bangsa ini.

Politik identitas pada Pilkada DKI tersebut berdampak hingga ke aktivitas kehidupan sosial masyarakat khususnya di Kota Jakarta. Bagaimana kasus penolakan untuk menyalati jenazah di beberapa sarana ibadah bagi masyarakat yang mendukung pemimpin kafir saat itu. Terang saja situasi tersebut memicu banyak kegaduhan di tingkatan masyarakat. Bahkan berujung hingga aksi pengusiran Djarot Saiful Hidayat usai menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Jami Al-Atiq, Tebet Jakarta Selatan, Jumat (14/4/2017) lalu sebagaimana dilansir detik.com. Djarot mendapat terikan "usir." Peristiwa ini terjadi setelah Djarot salat Jumat, ada beberapa jamaah dan takmir masjid berteriak meminta Djarot secepatnya keluar dari kawasan masjid sambil berucap takbir. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," teriak beberapa jamaah saat itu. "Usir...usir...usir..pergi, pergi," teriak jamaah lagi. Padahal sebelumnya, suasananya tidak demikian, Djarot bahkan sempat berfoto bersama dan bersalaman dengan jamaah lain sebelum salat Jumat dimulai. Kendati demikian, pihak Takmir Masjid membantah kejadian tersebut.

Kembali ke kasus Ahok. Akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menyatakan Ahok bersalah. Dia dianggap melanggar pasal 156 dan 156a KUHP. Dimana pasal 156 berbunyi: "Barang siapa di muka umum menyatakan

perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.” Kemudian bunyi pasal 156a: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

Belakangan pasca-Pilkada DKI Jakarta, isu politik identitas (sentimen agama) juga dipergunakan di Pilkada Jawa Barat. Sinyalemen ini terlihat sejak maraknya kasus penganiayaan atau persekusi yang terjadi pada sejumlah tokoh agama khususnya pengasuh pondok pesantren. Jika merunut rangkaiannya, setelah penganiayaan sejumlah tokoh agama di Jawa Barat, aksi tersebut melebar ke sejumlah wilayah seperti di Banten, khususnya Pandeglang dan Tangerang. Terakhir yang sempat menggugah publik adalah penyerangan kepada salah seorang Romo di Yogyakarta saat kebaktian.

Ada beberapa indikator yang oleh peneliti menjelaskan kenapa aksi penganiayaan sejumlah tokoh agama di Jawa Barat tersebut punya kaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat. 1). Jawa Barat merupakan basis suara terbesar yang menjadi penentu dalam Pilpres 2019. 2). Calon pasangan Pilkada Jawa Barat mewakili banyak faksi yakni kelompok Islam, nasionalis dan militer. Beberapa kasus penganiayaan terhadap tokoh agama yang terekam peneliti di Jawa Barat di antaranya dialami oleh KH Umar Basri yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung pada 27 Januari 2018 dan HR Prawoto, Komandan Brigade PP Persis di Blok Sawah Kelurahan Cigondewah Kaler, Kota Bandung pada 1 Februari 2018.

Kemudian pada kasus lain 11 Februari 2018, tindakan kekerasan terhadap tokoh agama dialami Romo Edmund Prier, SJ beserta jemaatnya di Gereja St Lidwina Bedog Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kekerasan juga terjadi terhadap Bisku Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada 7 Februari 2018.

Tabel. 1
Aksi Kekerasan/Persekusi Tokoh Agama Jelang Pilkada Serentak 2018

Nama Tokoh	Dugaan Kasus	Waktu Kejadian	Lokasi Kejadian
KH Umar Basri	Penganiayaan	27 Januari 2018	Pondok Pesantren Al-Hidayah, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat.
HR Prawoto	Penganiayaan	1 Februari 2018	Blok Sawah, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kota Bandung.
Romo Edmun Prier, SJ	Penganiayaan	11 Februari 2018	Gereja St Lidwina Bedog, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Biksu Mulyanto Nurhalim	Persekusi	7 Februari 2018	Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sumber: diolah (2018).

Aksi kekerasan tersebut mendapat respon dari sejumlah tokoh agama. Seperti dikemukakan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa

rentetan peristiwa tersebut menyiratkan adanya kebencian atas dasar sentimen keagamaan. Menurut hal itu harus dihentikan, dikutuk dan dijauhi. Menurutnya tidak kekerasan dalam agama.

“Negara platformnya adalah persatuan, kemanusiaan, supremasi hukum dan persamaan hak dan kewajiban. Itulah masyarakat Madinah yang dibangun Rasulullah SAW.” (Wawancara, 12 Februari 2018).

Menurutnya, kekerasan apalagi teror, radikal dan tindakan ekstrem lainnya adalah bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lanjut KH Said Aqil Siroj, tidak pernah melakukan atau mentolerir sikap ekstrim dan radikal.

“Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Tidak ada agama di dalam kekerasan. Artinya kalau ada kekerasan berarti itu bukan agama.” (Wawancara, 12 Februari 2018).

Pernyataan KH Said Aqil Siroj didukung oleh Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas. Ia meminta untuk menghentikan segala kekerasan yang terjadi. Kekerasan terhadap tokoh dan pemuka agama, apalagi didasari kebencian atas dasar sentimen keagamaan berpotensi melahirkan rasa saling curiga dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang pada gilirannya nanti menjadi gangguan keamanan yang cukup serius.

“Dalam momentum tahun politik 2018 dan 2019, mari kita buktikan Indonesia mampu melakukan sirkulasi kekuasaan dengan cara-cara yang beradab.” (Wawancara, 12 Februari 2018).

Hal inilah juga yang mendasari pertemuan dua organisasi besar keagamaan PBNU dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar pertemuan. Dalam pernyataan resmi yang diperoleh peneliti, kedua organisasi tersebut bersepakat untuk memperkuat literasi digital merespon maraknya hoaks, ujaran kebencian dan fitnah yang berujung pada semakin menguatkan politik identitas dalam yang mewarnai perpolitikan di Indonesia pada pelaksanaan

Pemilu 2019. Menurut kedua organisasi tersebut, hal-hal yang disebutkan tadi berpotensi mengganggu keutuhan bangsa dalam kehidupan kemasyarakatan dan keberagaman. Penguatan literasi digital ini dimaksudkan agar masyarakat secara bersama-sama membangun iklim dan suasana yang kondusif.

“Di tengah era sosial media kita membutuhkan kehati-hatian yang lebih.” (Pernyataan resmi Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, Jumat (23/3/2018).

Dalam kesempatan pertemuan itu, NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar-ikhtiar literasi digital sehingga terwujud masyarakat informatif yang berakhlakul karimah. Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak kepada semua pihak secara bersama-sama menjadikan ajang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dijadikan sebagai ajang demokrasi sebagai bagian dari cara hidup masyarakat sebagai bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya demokrasi bukanlah sekadar membutuhkan kerelaan hati menerima apa adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran. Akan tetapi demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian dan cita kasih antar-sesama.

“Hendaknya dalam demokrasi perbedaan jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan yang beraneka ragam.” (Pernyataan resmi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Jumat (23/3/2018).

Rangkaian gerakan massif penggunaan politik identitas (agama) dalam politik, menciptakan arus tersendiri di ruang publik yang berujung menjadi tren isu dan kemudian memengaruhi pola pikir masyarakat dalam berpolitik. Jika ini tidak diantisipasi, mampu mengubah genre eskalasi perpolitikan di Indonesia. Penggunaan politik identitas dipola sedemikian rupa sehingga terus menguat.

Warna politik identitas dalam sejarah perpolitikan di Indonesia sebenarnya tidak hanya terjadi sekali ini saja. Doddy Nugroho kembali menguraikan bagaimana di tahun 1966 telah

terjadi kebuntuan gerakan politik yang saat itu diwarnai konflik ideologi karena ada situasi geopolitik blok barat dan blok timur. Belakangan hal ini juga terjadi pasca-gerakan reformasi 1998 dimana menjadi puncak dari gerakan demokratisasi akibat tekanan orde baru selama 32 tahun berkuasa.

“Saat ini menurut hemat saya mengalami kebuntuan narasi gerakan, karena tidak ada isu yang bisa menemukan semua kekuatan politik negeri ini. Kecuali kembali ke politik identitas yang secara kebetulan momentum dan situasinya tepat.” (Wawancara, 12 September 2018).

Beberapa insiden bernuansa kekerasan atas nama agama saat gelaran Pilkada serentak 2018 yang berlangsung di 170 daerah, 70 di antaranya Pilkada Provinsi dimana daerah yang menyelenggarakan sebaran populasinya mencapai 75 persen populasi pemilih menjadi wajar dikhawatirkan hingga pelaksanaan Pilpres 2019. Sampai saat ini, Jokowi sebagai calon inkumben masih menjadi sasaran tembak oleh kelompok lawan dengan isu pribumisasi, antek asing, antek aseng. Beberapa kasus sempat terjadi mulai dari insiden persekusi warga yang sedang menikmati “car free day” di kawasan Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, dimana ada sekelompok orang menyerang warga yang menggunakan kaos #kerjakerjakerja.

Disusul oleh pernyataan Amin Rais yang menyebutkan bahwa “Dia (Jokowi) akan dikalahkan/dilengserkan oleh Allah SWT,” sambil menunjuk foto Jokowi. Dan gerakan #2019gantipresiden yang digawangi Mardani Ali

Sera politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan melibatkan Neno Warisman sebagai orator aksi. Alhasil aksi ini banyak mendapat penolakan warga, karena tuduhan dugaan makar dan mengujar kebencian. Meskipun #2019gantipresiden menuai pro-kontra, karena banyak yang menganggap bahwa gerakan tersebut sah-sah saja dalam iklim demokrasi di Indonesia. Namun kelompok penolak, justru melihat bahwa konten-konten isu yang disuarakan dalam aksi tersebut diduga ada maksud tujuan makar, yakni mengganti sistem pemerintahan/negara.

Figuritas Bakal Cawapres Presiden Joko Widodo sebagai Bakal Capres Inkumben

Figuritas bakal cawapres Presiden Joko Widodo sebagai bakal capres inkumben yang diamati peneliti difokuskan pada sosok yang dianggap oleh sebagian kalangan (masyarakat) mewakili aliran politik berbasis agama. Ada beberapa yang sempat mencuat. Antara lain: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau biasa dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin.

Berikut tabel klusterisasi berdasarkan observasi peneliti yang menjelaskan tentang positif negatif masing-masing figur.

Tabel. 2
Kluster Pemetaan Figur Bakal Cawapres Presiden Jokowi sebagai Bakal Capres Inkumben dengan Polarisasi Isu Berbasis Agama

Nama Kandidat	Keterwakilan	Pemetaan Potensi	Hambatan Politik
Muhaimin Iskandar	Partai Kebangkitan Bangsa	Politisi muda dan berpengalaman, memiliki kemampuan membaca arah arus politik, bisa dianggap mewakili kelompok Islam moderat, telah menata basis secara massif, dominan menjadi pemberitaan media,	Selama kepemimpinan di PKB belum terjadi kaderisasi kepemimpinan, sehingga dinilai belum mampu mendesain PKB sebagai partai terbuka, tidak dianggap mewakili faksi-faksi di internal

		memiliki jejaring infrastruktur partai, dan masuk dalam figur yang dianalisis lembaga survei.	organisasi NU, namanya disebut-sebut dalam persidangan kasus suap laporan keuangan di Kemenakertrans, kerap melakukan manuver meski PKB merupakan partai pendukung pemerintah, sikap inilah yang dinilai resisten oleh kubu Jokowi, tidak dianggap sebagai keterwakilan kelompok Islam “kanan,” dan membuka ruang terjadinya perbedaan pendapat dari koalisi parpol pendukung Jokowi.
Romahurmuziy	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Tidak pernah bermanuver selama menjadi partai pendukung pemerintah, masih punya peluang untuk mengonsolidasi pemilih berumur karena nama besar PPP, khususnya kalangan Islam tradisional dan memiliki jaringan infrastruktur partai.	Kurangnya pencitraan sebagai politisi muda, sehingga belum terlahir dikenal kelompok anak muda (pemilih pemula/pemilih millennial), gerakan politiknya kurang massif, masih membuka ruang terjadinya perbedaan pendapat koalisi parpol pendukung Jokowi, tidak masuk dalam pemetaan lembaga survei, kekuatan PPP yang terbelah lantaran konflik yang berkepanjangan akibat dualisme kepemimpinan dan tidak dianggap mewakili kelompok Islam “kanan.”
KH Ma’ruf Amin	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Seorang guru besar yang ahli di bidang ekonomi umat (syariah) yang dikenal dengan Arus Baru Ekonomi Indonesia, Ketua Umum MUI, ulama yang dikenal ahli dalam politik (politisi senior), karena pernah menjabat beberapa jabatan penting di parlemen, relatif bisa	Masih dituduh sebagai ulama beraliran “kanan,” oleh sejumlah pihak, dianggap sebagai guru bangsa, pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden SBY, sudah berumur, dan citra MUI dikuasai oleh kelompok Islam “Kanan” oleh sebagian

		diterima oleh kelompok Islam “kanan” karena beberapa persetujuan politik mampu diselesaikan dengan baik, masuk dalam analisa lembaga survei, namanya kerap disebut oleh sejumlah tokoh yang cukup dikenal dalam kancah politik nasional, tidak resisten di internal NU karena merupakan Rais Aam PBNU dimana Rais Aam merupakan jabatan terhormat dan tertinggi sehingga bisa mengkonsolidasi suara NU secara bulat, tidak resisten di internal koalisi parpol pendukung bakal capres Jokowi dan figur yang bersih.	ulama yang moderat,
KH Said Aqil Siroj	Nahdlatul Ulama/Islam Moderat	Masih bisa mengkonsolidasi suara NU khususnya jenjang struktural, masuk dalam salah satu tokoh agama (ulama) yang berpengaruh skala internasional, gelar akademik yang mendukung, figur yang bersih dan ahli di bidang sejarah Islam khususnya peta politik Islam.	Resisnten terhadap isu Syiah yang selama ini dituduhkan kepadanya oleh kelompok Islam “kanam,” kurang terdukung oleh kalangan NU kultural karena efek dari Muktamar NU di Jombang, potensi suara NU tidak bulat, banyak ceramah-ceramahnya dinilai kontroversi oleh sejumlah aliran Islam yang menyebabkan isi ceramah tersebut menjadi alat propaganda kelompok Islam “kanan,” dan tidak masuk dalam analisa lembaga survei.
Mahfud MD	Akademisi	Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sosok yang bersih, masuk dalam analisa lembaga survei, sebagai tokoh yang ahli di bidang	Belum mampu diterima oleh sebahagian kalangan NU dan kelompok Islam “kanan,” tidak dianggap memiliki basis pendukung yang konsisten atau massif, dan masih mengundang resistensi di koalisi parpol pendukung bakal

		hukum dan akademis.	capres Jokowi khususnya dari PKB dan PPP.
Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang	Islam dan politisi	Masih menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, masih bisa diterima di kalangan kelompok Islam “kanan,” mewakili zona Indonesia Timur, masuk dalam analisa lembaga survei.	Politisi Demokrat yang merupakan partai oposisi pemerintahan, sempat disebut-sebut memiliki kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di NTB, belum memiliki basis massa pendukung yang massif.
Din Syamsuddin	Muhammadiyah	Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dinilai mewakili kelompok Islam modernis, belum pernah tersangkut kasus dugaan korupsi.	Masih dinilai belum memiliki basis massa yang massif, tidak dianggap mewakili kelompok Islam tradisional, tidak masuk dalam analisis lembaga survei.

Sumber: hasil observasi yang diolah (2018).

Dari tabel di atas peneliti memandang, sebenarnya masing-masing figur bakal cawapres yang diklusterisasi mewakili kelompok Islam memiliki peluang yang sama, terlebih pada saat politik identitas menguat. Hanya saja dalam proses pengambilan keputusan Presiden Jokowi sebagai bakal capres inkumben, harus menganalisis secara matang, termasuk penilaian dan respon dari koalisi partai pendukung. Menguatnya figur bakal cawapres tadi khususnya mewakili faksi Islam, dalam proses perjalanan penentuannya juga melemahkan figur bakal cawapres dari kalangan militer. Sebut saja nama Kepala Staf Presiden Moeldoko, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga disebut sebagai faksi militer mewakili kaum muda.

Meski dalam setiap perkembangan politik, Moeldoko misalnya sebagai KSP dia sangat pasang badan untuk Jokowi, terlebih ketika ada “serangan-serangan” dari kelompok oposisi yang menyerang pemerintahan Jokowi. Hanya saja Moeldoko menurut pengamatan peneliti, meskipun namanya menguat di akhir-akhir menjelang pengumuman bakal cawapres, tetap tidak dianggap mewakili faksi Islam, meskipun Moeldoko dikenal dekat dengan sejumlah tokoh ulama lantaran dia rajin berkunjung ke majelis-majelis dan pondok-pondok pesantren. Bahkan dia memiliki sebuah masjid yang didirikan di

kampung halamannya. Entah penyebabnya apa, tetapi menurut peneliti, tidak dipilihnya nama Moeldoko, karena citra “religius” maupun “militer religius” tidak tercitrakan cukup baik di masyarakat. Di lain sisi, Moeldoko sebenarnya pasti memperoleh dukungan dari Partai Hanura sebab posisinya sebagai dewan penasihat. Atribut “Partai Hanura” inilah yang juga diduga oleh peneliti memicu dirinya tidak terpilih sebagai bakal cawapres bakal capres inkumben Jokowi, termasuk kaitan Moeldoko saat menjabat Panglima TNI saat itu terjadi di pemerintahan SBY. Kondisi inilah yang memicu resistensi di kalangan koalisi parpol pendukung bakal capres inkumben Jokowi.

Demikian halnya dengan Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI. Padahal kelompok oposisi sempat mewacanakan namanya sebagai bakal capres bahkan menjadi bakal capres jika saat itu perkembangan politik memaksa terjadinya poros ketiga. Melemahnya Gatot Nurmantyo disebabkan oleh banyak manuver yang dilakukan olehnya di akhir-akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Beberapa yang sempat terekam oleh peneliti dan hal itu menuai kontroversi antara lain: pembeberan informasi mengenai adanya institusi non militer yang membeli 5.000 pucuk senjata yang mencatat nama Presiden Joko Widodo. Tindakan ini dianggap membocorkan rahasia negara, karena Gatot Nurmantyo mengaku

menerima laporan tersebut dari data intelejen. Institusi non militer yang dimaksud tak lain adalah Polri, yang akhirnya pernyataan tersebut diklarifikasi oleh Polri bahwa pengadaan senjata tersebut untuk digunakan untuk menindak kejahatan terorisme.

Kemudian perihal pembelian helikopter yang dinilai menyudutkan Kementerian Pertahanan, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang harus direvisi. Dalam pernyataannya, Gatot Nurmantyo mendesak agar TNI masuk dalam bagian penanganan terorisme. Ia mengatakan, jika tidak melibatkan TNI maka teroris akan terus berpesta di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, penanganan terorisme sejauh ini merupakan peran penuh Polri. Adalagi desakan kepada Menteri Pertahanan agar membeli pesawat tempur Sukhoi dan kapal selam Kelas Kilo. Pernyataan Gatot Nurmantyo membuat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryamizard Ryacudu meradang. Ryamizard langsung merespon pernyataan tersebut dengan mengatakan “Membeli Sukhoi tidak semudah membeli kacang goreng.”

Kontroversi lainnya adalah menyatakan bahwa beberapa daerah di Indonesia menjadi basis ISIS (*Iraq-Syiria Islamic State*), pernyataan ini memicu kecemasan masyarakat. Yang paling mengejutkan adalah instruksi kepada seluruh jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G 30 S PKI yang oleh peneliti dinilai sebagai langkah manuver politik untuk mengkonsolidasi suara dukungan saat nama Gatot Nurmantyo ramai diperbincangkan sebagai capres. Ini sekaligus menguatkan politik identitas “PKI” yang sempat dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu. Gatot Nurmantyo juga berupaya merebut klaim kelompok Islam “kanan.” Hal ini ditandai dirinya menggunakan kopiah kelir putih saat menyambangi aksi 411 dan 212. Terakhir adalah kalimat “menyerbu polisi,” direspon sebagai bentuk ancaman dan pernyataan tersebut melanggar Undang-Undang TNI pasal 3 dan 17 yang berbunyi: “Kedudukan TNI di bawah Presiden (pasal 3) dan pengerahan kekuatan TNI merupakan kewenangan Presiden atas persetujuan DPR (pasal 17.” Tindakan kontroversi ini memicu resistensi. Tak kalah penting adalah, Gatot Nurmantyo tidak memiliki kendaraan politik, tidak seperti Prabowo Subianto.

Bagaimana dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kendati citranya mewakili kelompok muda, akan tetapi beberapa alasan dia

tidak terpilih masuk bursa capres maupun cawapres, hal itu lebih disebabkan karena AHY masih dianggap mewakili kepentingan politik SBY. Ini artinya sikap politik AHY belum mandiri. Selanjutnya penilaian lain adalah kekalahannya dalam Pilkada DKI Jakarta yang hanya menorehkan angka di bawah 20 persen.

Terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai Bakal Cawapres Bakal Capres Inkumben Joko Widodo

Terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai Bakal Cawapres Bakal Capres Inkumben Joko Widodo sebenarnya terjadi di luar prediksi. Meski nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut masuk sebagai nama cawapres di sejumlah lembaga survei. Di detik-detik menjelang tahapan pendaftaran bakal capres-cawapres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, justru ada dua nama yang menguat sebagai bakal cawapres Jokowi, yakni Mahfud MD dan Moeldoko.

Namun, belakangan nama Moeldoko meredup, justru yang menguat adalah Mahfud MD. Dari hasil observasi peneliti, menguatnya nama Mahfud MD karena mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai sosok akademisi yang bisa diterima oleh semua faksi-faksi Islam/peta kekuatan Islam, bersih, sehingga mampu membentengi Jokowi terhadap serangan isu-isu “politik identitas” yang dituduhkan kepadanya. Bahkan koalisi parpol pendukung Jokowi sendiri sudah santer menyebut namanya.

Tapi di akhir penentuan, justru arah politik berubah drastis. Menurut informasi yang dikumpulkan peneliti, bakal cawapres Jokowi ini menjadi investasi politik pada pilpres lima tahun selanjutnya. Artinya apa, bahwa bakal cawapres Jokowi sangat berpotensi menjadi bakal capres pilpres lima tahun ke depan. Alasan inilah yang juga menjadikan Jokowi untuk tidak memilih bakal cawapresnya dari kalangan parpol, terlebih figur dari koalisi parpol pendukung. Karena jika Jokowi mengambil bakal cawapresnya dari kalangan parpol pendukung, maka dikhawatirkan terjadi pecah kongsi. Hal ini akhirnya disepakati oleh para ketua umum parpol pendukung. Untuk pilpres lima tahun ke depan, semuanya bersepakat untuk memulainya dari awal lagi. Jika saat itu bakal cawapres Jokowi adalah Mahfud MD, maka

Mahfud berpotensi besar menjadi bakal capres selanjutnya.

Di samping itu, kendala lain atas tidak dipilihnya Mahfud MD, karena dalam rentetan serangan politik yang bernuansa “politik identitas” ditujukan kepada Jokowi belum bisa terpersonafikasi melalui Mahfud MD. Apalagi kelompok Islam anti Jokowi menggelar Ijtima Ulama dimana salah satu keputusannya adalah menggandeng figur ulama sebagai pemimpin nasional. Sosok Mahfud MD menurut peneliti belum terkategori sebagai ulama. Rupanya Jokowi melihat momentum tersebut saat kelompok lawan menggambarkan kepentingan politiknya yang diwakili oleh figur “ulama.”

Sementara KH Ma'ruf Amin dalam rekam jejaknya sudah makan banyak asam garam dalam dunia gerakan Islam. Selain pernah duduk di parlemen, pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pastinya, semenjak aksi 411 dan 212 sosok KH Ma'ruf Amin mampu memberikan perimbangan kekuatan lawan Jokowi dengan kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI. Rekam jejak tindakan yang dilakukan KH Ma'ruf Amin secara tidak langsung sebenarnya melindungi keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam aksi 411 dan 212 berujung pada desakan untuk melengserkan Jokowi sebagai presiden. Dan hal tersebut mahal harganya.

Doddy Nugroho kembali membenarkan bahwa pilihan Jokowi menetapkan KH Ma'ruf Amin sebagai bakal cawapresnya akibat menguatnya politik identitas. “Saya kira dalam analisa subjektif saya, iya. Tepatnya itu jawaban (dipilihnya KH Ma'ruf Amin, *Red*) Jokowi atas situasi politik saat ini,” kata Doddy (*wawancara, 12 September 2018*).

KESIMPULAN

1. Indikator terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden bakal calon presiden inkumben Joko Widodo akibat menguatnya politik identitas (bernuansa agama) atas situasi politik di Indonesia.
2. Politik identitas yang berkembang di Indonesia saat ini, menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

3. Politik identitas menjadi sarana konsolidasi kekuatan politik di Indonesia saat ini pasca-reformasi 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhinkha Cipta.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nuri Soesono, 2018, Paparan Seminar Nasional Refleksi 20 Tahun Reformasi, Dosen Ilmu FISIP UI, diakses Rabu (29/8/2018) pukul 15.20 Wib, melalui <http://www.ui.ac.id/berita/refleksi-20-tahun-reformasi-nasionalisme-dan-kewarganegaraan-sebagai-tantangan-politik-identitas.html>.
- Mario Rustan. (2018). Artikel Memahami "Politik Identitas", diakses Rabu (29/8/2018) pukul 15.17 Wib melalui <https://magdalene.co/news-1627-memahami-%E2%80%98politik-identitas%E2%80%99.html>, artikel.
- Moeleng. Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. ke-11. Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.
- Pasal 156 & pasal 156a, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) RI.
- Pasal 3 dan 17, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Pernyataan Resmi Bersama; PBNU dan PP Muhammadiyah, Jakarta, 2018.
- Ridwan. (2004). *Statiska untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan-Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung, hal. 295.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung. hal. 308.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung. hal. 309.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung. hal. 316.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung. hal. 326.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur DKI Jakarta_2017, diakses Rabu (29/8/2018), pukul: 17.15.

<https://news.detik.com/berita/3474648/teriakan-usir-dan-pergi-menggema-usai-djarot-salat-jumat-di-tebet>, diakses Jumat (31/8/2018), pukul 13.32 Wib.

Wawancara KH Robikin Emhas, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-

undangan, wawancara, Senin (12 Februari 2018), Jakarta.

Wawancara KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, wawancara Senin (12 Februari 2018), Jakarta.

Wawancara dengan Doddy Nugroho, Pemerhati Politik, wawancara, Kamis (13 September 2018), Jakarta.